

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Suara Merdeka
Media Online

Wilayah: BPK Jateng

Halaman 3

BPK Jateng Serahkan LHP

SEMARANG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jateng menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara *online* menggunakan ruang konferensi *zoom pro*, Senin (27/4). LPH itu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2019 kepada Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Blora.

Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta menggunakan bantuan auditor Inspektorat Daerah. Permintaan keterangan/wawancara dengan entitas, permintaan dokumen/data, koordinasi tim dan *review* konsep LHP dengan melalui *e-mail*, *whatsapp*, dan *online meeting*.

Penyerahan LHP secara *online* dilakukan Kepala BPK Perwakilan Jateng, Ayub Amali dan diikuti para pejabat struktural dan fungsional BPK Perwakilan Provinsi Jateng serta Ketua Tim Pemeriksa LKPD Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Blora.

"BPK Perwakilan Jateng tetap melakukan upaya menjaga kualitas pemeriksaan dengan meningkatkan *quality control* dan *quality assurance* dari pengendali teknis dan Penanggung Jawab Pemeriksaan. Penyerahan LHP LKPD dilakukan secara simbolis dengan menunjukkan dokumen LHP melalui *share screen zoom*," ujarnya.

LHP diterima oleh Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Ketua DPRD Blora HM Darsum, dan Bupati Blora, Djoko Nugroho, diikuti oleh pejabat struktural lainnya. Acara penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Blora TA 2019 dilaksanakan sekira pukul 14.00 WIB.

Opini WTP

Berdasarkan pemeriksaan LKPD TA 2019 yang telah dilakukan, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Blora berhasil mempertahankan Opini WTP. Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. Buku pertama memuat LKPD dan opini BPK atas LKPD, buku kedua memuat temuan-temuan terkait SPI. Buku ketiga memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Blora, BPK masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD," imbuh Ayub.

Permasalahan tersebut antara lain, pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Karanganyar TA 2019 belum optimal. Pengelolaan penerimaan perizinan reklame di Kabupaten Karanganyar belum optimal. Kemudian kekurangan volume pekerjaan pada lima paket pekerjaan di Kabupaten Karanganyar dan denda keterlambatan pada lima paket pekerjaan.

Penyewaan Gedung Konco Tani dan Gedung DPRD Kabupaten Blora tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang milik daerah. Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Blora belum dipertanggungjawabkan dan terlambat dipertanggungjawabkan. Pajak BOS di Kabupaten Blora belum disetor tepat waktu serta terdapat sisa kas sekolah regrouping belum disetor ke kas daerah provinsi.

"Saya berharap agar hasil pemeriksaan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bersama-sama berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," tambah Ayub. (K18-44)



SM/dok

KONFERENSI ONLINE : BPK Perwakilan Jateng menyerahkan LPH atas LKPD untuk Tahun Anggaran 2019 kepada Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Blora secara online menggunakan ruang konferensi zoom pro, belum lama ini. (34)